

**TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP SISTEM
PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN
KE EMPAT UUD 1945**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**ZULKIFLI
NIM 10727000183**

ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN SYARIF KASIM

RIAU 2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini Berjudul : " TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN KE EMPAT UUD 1945 " yang di tulis oleh:

Nama :ZULKIFLI
Nim :10727000183
Jurusan: ILMU HUKUM (HTN)

Telah di munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program Stara (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal: 18 Juni 2014
Tempat : Ruangan Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sehingga diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Pekanbaru, 18 Agustus 2014

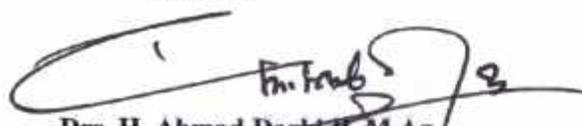


Dekan,

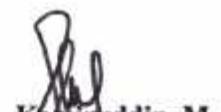
Dr. H. Akbarizan, MAg. M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA


Drs. H. Ahmad Darbi B. M.Ag
NIP: 1953030 8198303 1 003

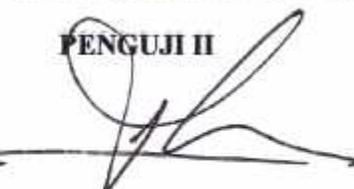
SEKERTARIS


Kamiruddin, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

PENGUJI I


DR. Hajar M, MH
NIP.19581231 198603 1 426

PENGUJI II


Zulfahmi Nur, M.Ag
NIP.19720922 200501 1 004

ABSTRAK

Sistem pemerintahan Indonesia dapat berubah menurut periodisasi pergantian konstitusi, yaitu dimulai pada masa 1945-1949, 1949-1950, 1950-1959, dan 1959 sampai dengan keruntuhan Orde Baru. Selanjutnya pasca Orde baru, yaitu berkaitan dengan Perubahan UUD I, II, III, dan IV, pola sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 juga belum memperlihatkan adanya suatu kejelasan sistem pemerintahan yang dianut, namun para wakil rakyat berupaya untuk menerapkan presidensiil murni (pemilihan presiden secara langsung) dengan bentuk parlemen bicameral (dua kamar), tetapi hal ini perlu dilihat lebih lanjut kenyataan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana amandemen terhadap UUD 1945, dan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini maka penulis mengambil data pada pendapat-pendapat para ahli dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pada Perubahan (Amandemen) Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 masih terlihat bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem presidensiil, yang ditunjukkan melalui pasal-pasal yaitu Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 7C, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 20A. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep yang telah ada dalam UUD 1945, yaitu konsep dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara stabil sesuai dengan ketentuan konstitusi (UUD).

Sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi (UUD) Indonesia, adalah sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini dibuktikan, bahwa Presiden dan para menteri tidak tergantung kepada parlemen, sehingga pemerintahan diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan dalam konstitusi (UUD). Di samping itu dalam sistem pemerintahan presidensiil pertanggungjawaban pemerintahan ada di tangan Kepala Negara (Presiden). Di sini tugas presiden merangkap, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, dengan demikian para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan sekaligus bertanggungjawab kepadanya. Dalam hal ini parlemen tidak berhak untuk membubarkan kementerian negara, sehingga pemerintahan dapat dilaksanakan dengan stabil sesuai dengan UUD.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidikan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2014

ZULKIFLI

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : GAMBARAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN

DAN KEDAULATAN RAKYAT

A. Sistem Pemerintahan.....	9
B. Kedaulatan Rakyat.....	15
C. Pembagian Kekuasaan.....	24

BAB III : PROFIL PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Masa Tahun 1945-1949.....	28
B. Masa Tahun 1949-1950.....	30
C. Masa Tahun 1950-1959.....	30
D. Masa 1959-sampai Keruntuhan Orde Baru.....	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan (Amandemen) UUD 1945.....	34
1. Amandemen Pertama Tahun 1999.....	34

2. Amandemen Kedua Tahun 2000.....	42
3. Amandemen Ketiga Tahun 2001.....	45
4. Amandemen Keempat Tahun 2002.....	47
B. Sistem Pemerintahan Presidensil.....	55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA